

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan BSPS di lapangan memperlihatkan dinamika relasi kuasa yang kompleks antara pemerintah, fasilitator, dan masyarakat. Fasilitator menjalankan peran penting sebagai penghubung kekuasaan pemerintah dengan masyarakat, tetapi praktik ini tidak selalu berjalan mulus. Resistensi, negosiasi, dan konflik menunjukkan bahwa kekuasaan bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh interaksi di tingkat lokal. Dalam kerangka Foucault, proses ini mencerminkan bagaimana kekuasaan bekerja melalui aturan dan norma, sekaligus membuka ruang bagi resistensi dan perubahan.

1. Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Bireuen berlangsung melalui tahapan formal yang telah ditetapkan pemerintah, meliputi seleksi penerima, verifikasi administrasi, hingga proses pembangunan dan evaluasi. Namun, dalam implementasinya, ditemukan beberapa tantangan seperti ketimpangan dalam akses informasi, keterbatasan swadaya masyarakat, serta adanya praktik informal yang mempengaruhi distribusi bantuan. Meskipun program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah, tidak semua penerima bantuan mampu memenuhi persyaratan swadaya yang ditetapkan, sehingga menghambat efektivitas program di tingkat lokal.
2. Relasi kuasa dalam pelaksanaan BSPS di Kabupaten Bireuen terbentuk melalui interaksi antara berbagai aktor, yaitu pemerintah, perangkat

gampong, tenaga fasilitator, dan masyarakat penerima manfaat. Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan dan alokasi anggaran, sementara perangkat gampong dan tenaga fasilitator memainkan peran sebagai penghubung yang memastikan implementasi berjalan di tingkat lokal. Dalam praktiknya, relasi kuasa ini bersifat dinamis, di mana masyarakat tidak hanya sebagai objek kebijakan, tetapi juga berupaya menegosiasikan posisi mereka dalam program. Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya, seperti kepercayaan, tradisi tertentu dan gotong royong, turut membentuk pola interaksi dan distribusi bantuan di lapangan.

3. Kekuasaan negara termanifestasi melalui regulasi teknis dan petunjuk pelaksanaan yang menentukan struktur rumah, jenis material, dan prosedur administratif. Ini menunjukkan bentuk kekuasaan *disciplinary* sebagaimana dikemukakan oleh Foucault, di mana masyarakat dikonstruksi sebagai subjek yang harus tunduk pada norma-norma yang telah dibakukan negara.
4. Fasilitator menjadi aktor kunci dalam mendistribusikan kekuasaan negara ke masyarakat. Mereka tidak hanya menjalankan fungsi teknis, tetapi juga menjadi medium normalisasi memastikan bahwa masyarakat mengikuti standar pemerintah. Namun dalam praktiknya, mereka juga mengalami tarik menarik antara kewajiban birokratis dan kebutuhan masyarakat, yang menciptakan ruang negosiasi kekuasaan.
5. Masyarakat tidak sepenuhnya pasif. Mereka menunjukkan resistensi melalui negosiasi desain rumah, penggunaan material berbeda, dan penyesuaian aspek teknis lain yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan

lokal. Hal ini membuktikan bahwa kekuasaan bersifat produktif dan tidak selalu represif ia melahirkan respon dan adaptasi.

6. Ketimpangan informasi dan akses menjadi alat kekuasaan terselubung. Masyarakat yang memiliki relasi sosial yang kuat dengan perangkat lokal lebih mudah mengakses program dan memengaruhi jalannya pelaksanaan. Ini memperlihatkan bahwa kuasa tidak hanya bekerja melalui regulasi, tetapi juga melalui struktur sosial lokal.
7. Pentingnya relasi kuasa dalam implementasi BPS terletak pada bagaimana kekuasaan menentukan siapa yang berhak menerima bantuan dan bagaimana kebijakan diterapkan di tingkat masyarakat. Relasi kuasa yang terbentuk mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, efektivitas pendistribusian bantuan, serta keberlanjutan program. Ketimpangan dalam akses informasi dan dominasi administrasi formal menjadi instrumen kekuasaan yang mengontrol penerima bantuan, sehingga masyarakat yang memiliki akses dan jaringan sosial lebih baik cenderung mendapatkan keuntungan lebih besar dari program ini. Namun, di sisi lain, adanya negosiasi dan strategi adaptasi yang dilakukan masyarakat menunjukkan bahwa mereka tidak hanya tunduk pada kebijakan, tetapi juga berperan aktif dalam menyesuaikan program dengan kebutuhan lokal mereka.

Secara keseluruhan, pelaksanaan BPS di Kabupaten Bireuen tidak hanya dapat dilihat sebagai program pembangunan perumahan, tetapi juga sebagai arena di mana berbagai kepentingan dan kekuasaan saling berinteraksi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap relasi kuasa dalam program ini menjadi kunci untuk

meningkatkan efektivitas kebijakan dan memastikan bahwa manfaatnya dapat diterima secara lebih adil oleh masyarakat.

## **B. Saran**

Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Bireuen masih menghadapi tantangan dalam transparansi, akses informasi, dan keterbatasan swadaya masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas program, Kementerian PUPR perlu memperkuat mekanisme penyebaran informasi melalui layanan digital atau forum desa agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya dalam program ini. Selain itu, peran fasilitator sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat harus ditingkatkan dengan memberikan pelatihan yang lebih komprehensif serta insentif yang memadai. Dengan demikian, fasilitator dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak terpengaruh oleh praktik informal yang berpotensi menghambat program.

Selain itu, penting bagi Kementerian PUPR untuk mempertimbangkan integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam implementasi BSPS. Tradisi seperti gotong royong dan orientasi rumah terhadap kiblat dapat menjadi bagian dari pendekatan pembangunan yang lebih inklusif. Dengan mengakomodasi kearifan lokal ini, program BSPS dapat lebih diterima oleh masyarakat serta meningkatkan efektivitas implementasi di tingkat lokal. Mekanisme pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat juga perlu dikembangkan agar distribusi bantuan lebih transparan dan akuntabel, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara lebih adil oleh semua penerima.

Penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada eksplorasi mendalam mengenai interaksi antara kebijakan formal dan tradisi lokal dalam konteks pembangunan masyarakat. Salah satu peluang inovasi riset adalah menggali bagaimana nilai-nilai budaya seperti *peusijek* atau orientasi rumah terhadap kiblat dapat diintegrasikan dalam kebijakan teknis program perumahan. Dengan memahami konteks sosial dan budaya masyarakat secara mendalam, fasilitator dapat lebih efektif dalam menjembatani kebijakan formal dengan praktik lokal. Riset berikutnya dapat mengevaluasi dampak penerapan pelatihan berbasis budaya terhadap efektivitas program pembangunan, khususnya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan keberlanjutan program. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan tetapi juga memberikan dampak nyata pada peningkatan kualitas implementasi kebijakan pembangunan di masa depan.

